

BAB III

TINJAUAN UMUM

3.1 Sejarah Berdirinya Departemen Pekerjaan Umum

Sejarah ini berawal dari “Lintasan Kenangan Peristiwa 3 Desember 1945” yang merupakan peristiwa bersejarah dimana peristiwa ini terjadi dikota Bandung tepatnya di Gedung bekas Departemen Van Verkeer en Waterstaat yang lebih terkenal dengan nama Gedung Sate. Gedung tersebut terletak di jalan Diponegoro no.22, yang merupakan konsekuensi dan kelanjutan dari proklamasi kemerdekaan RI yang dilandasi oleh jiwa dan semangat perjuangan yang patriotik dari para pemuda yang terhimpun dalam suatu wadah gerakan yang teratur dan terorganisir dengan nama “Gerakan Pekerjaan Umum”. Jumlah anggotanya kurang lebih 40 orang dibawah pimpinan Nurludin. Sedangkan untuk seksi pertahanan dipimpin oleh S.M. Arsyad dan Amir Madjid. Kemudian untuk melakukan tugas, gerakan ini menggalang kerja sama dengan berbagai instansi lainnya seperti Kereta Api, Dana Pensiun dan lain-lain.

Adapun peristiwa ini terjadi antara tanggal 2 September s.d 3 Desember 1945, dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

2 September 1945

Dibentuknya Kabinet RI yang pertama sebagai Kabinet Presidentil dengan Meteri PU Abikusno Tjokrosujono, yang merangkap sebagai Menteri Perhubungan Administrasi Interim. Adapun petugas yang dipercaya antara lain : Ir. Pengeran Muhammad Noor sebagai senior bertindak mewakili Menteri PU, dan senior

lainnya yang ada dilingkungan Departemen PU ialah : Ir. Djuanda, Ir. Sediatmo, Ir. Putuhena, Ir. H. Laoh, Ir. Kusumaningrat, Ir. Soetoto, Rusno, Sarbini, Kamarga, Kusmardjo dan lain-lain.

25 September 1945

Pengambilalihan kekuasaan atas Gedung kantor Tobu Bunshitu dengan segala inventaris kekayaan milik negara dari penguasa Jepang oleh para pemuda dan dijadikan Gedung kantor yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum RI yang sebelumnya terjadi suatu insiden dimana Nurludin sebagai Pemimpin GPPU ditahan sesaat oleh pihak Jepang yang kemudian dilepaskan setelah terjadi unjuk rasa.

2 Oktober 1945

Pengucapan Sumpah Setia kepada Negara RI oleh para pemuda, pegawai dan karyawan PU di Bandung dibawah pimpinan Ir. Pangeran M. Noor.

4 Oktober 1945

Suasana hangat dan eksplosif mulai mengembang di kota Bandung dan sekitarnya. Pihak Sekutu yaitu Divisi India ke-23 dari komando Asia Tenggara, yang semula datang ke Bandung untuk mengurus tahanan perang dan interniran sekutu, ternyata diboncengi NICA yang bermarkas di bagian utara kota Bandung. Sehingga provokasi demi provokasi, insiden demi insiden dilancarkan oleh pihak tentara Belanda. Gedung Sate terus dijaga dan dipertahankan oleh pasukan GPPU, dengan dibantu oleh pasukan dari Badan Perjuangan yang terdiri kurang lebih 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Pertempuran pun berlangsung selama tiga hari, yang akhirnya pada hari keempat tentara sekutu dan Belanda

mundur dari pertahanannya. Hari berikutnya di front bagian utara terjadi pertempuran, pasukan GPPU ditarik untuk membantu menghadapi pertempuran tersebut.

3 Desember 1945

Merupakan puncak dari kegiatan itu dimana tentara sekutu dan Belanda datang menyerbu dengan persenjataan lengkap mengepung Gedung Sate dari segala penjuru. Dengan semangat membaja pantang menyerah dan tidak megenal putus asa dengan persenjataan dan kekuatan yang ada terus mempertahankan Gedung Sate yang dipergunakan sebagai Gedung kantor pertama dari Departemen Pekerjaan Umum sebagai salah satu lembaga kekuatan Pemerintah RI. Pertempuran berakhir sekitar pukul 14.00, dimana pertempuran ini mengambil korban sebanyak 21 orang pemuda/pegawai diantaranya 7 orang hilang/tidak diketahui jenazahnya. Setelah diadakan penelitian dan pengecekan, diketahui 7 orang itu adalah :

1. Didi Hardianto Kamarga
2. Muchtaruddin
3. Suhodo
4. Rio Susilo
5. Subengat
6. Rana
7. Sarjono

Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasa ketujuh pemuda/pegawai tersebut, maka dibuatlah sebuah monumen "Batu Peringatan" yang bertuliskan :

“ Dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945 tujuh pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952 diketemukan jenazah Suhodo, Didi dan Muchtaruddin, yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah Rana, Subengat, Surjono dan Susilo tetap berada disini Bandung 31 Agustus 1952”.

Selanjutnya diadakan sidang Badan Pertimbangan yang membahas usulan-usulan antara lain menetapkan tanggal 25 September 1945 sebagai hari pekerjaan umum dan tenaga dan tanggal 3 Desember 1945 sebagai hari buruh PU dan tenaga, selanjutnya diambil keputusan dengan mengajukan pendapat dan pertimbangan kepada Menteri PU mengingat berdirinya Departemen Pekerjaan Umum ini tanggal 2 September saat dibentuknya Kabinet RI yang pertama saat setelah proklamasi.

Bahwa tanggal 3 Desember 1945 patut dijadikan “Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga”, yang diperingati secara intern oleh segenap warga Departemen PU dan Tenaga atas pertimbangan, peristiwa 3 Desember 1945 merupakan momentum penting dan bersejarah yang telah melahirkan jiwa korsa Pekerjaan Umum.

3.2 Struktur Organisasi Kanwil Departemen Pekerjaan Umum

Berdasarkan Kepmen PU No. 211/KPTS/1994 tgl. 28 Juli 1994 Kanwil Departemen Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Kanwil. Sedangkan Eselon yang ada dibawahnya adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang. Sebagai unit yang paling rendah adalah seksi-seksi.

3.2.1 Bagian Tata Usaha

3.2.1.1 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha Kantor Wilayah.

Fungsinya adalah :

- Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan urusan umum.

3.2.1.2 Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Sub Bagian Keuangan

Tugasnya melakukan urusan administrasi keuangan dan administrasi bantuan luar negeri serta akuntansi.

- Sub Bagian Umum

Tugasnya melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, rumah tangga, hukum dan kepustakaan.

- Sub Bagian Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata laksana dan organisasi serta pendidikan dan pelatihan.

3.2.2 Bagian Bidang Bina Program

3.2.2.1 Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta melakukan pembinaan dalam perencanaan penyusunan program dan anggaran.

Fungsinya adalah :

- Koordinasi, sinkronisasi serta penyusunan program dan anggaran;
- Penyusunan pengembangan dasar perencanaan;
- Pelaksanaan urusan informasi tata laksana.

3.2.2.2 Bidang Bina Program terdiri dari :

- Seksi Informasi Tata Laksana (Intal)

Tugasnya memantau dan menyiapkan bahan evaluasi serta menyajikan informasi pelaksanaan pembangunan dan melakukan urusan hubungan masyarakat.

- Seksi Program dan Anggaran

Tugasnya menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta menyusun program dan anggaran.

- Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan

Tugasnya menyiapkan bahan dasar penyusunan pengembangan dan perencanaan pembangunan wilayah serta analisis mengenai dampak lingkungan.

3.2.3 Bagian Bidang Bina Teknik

3.2.3.1 Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik atas pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain dengan menggunakan fasilitas laboratorium pengujian.

Fungsinya adalah :

- Pembinaan teknik atas urusan pekerjaan umum;
- Pengawasan teknik atas urusan pekerjaan umum;
- Pembinaan dan pengelolaan seluruh peralatan serta pelaksanaan inventarisasi barang kekayaan milik negara.

3.2.3.2 Bidang Bina Teknik terdiri dari :

- Seksi Bimbingan Teknik

Tugasnya memberikan bimbingan teknik atas pelaksanaan urusan pekerjaan umum.

- Seksi Pengawasan Teknik

Tugasnya melakukan pengawasan teknik atas pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain dengan menggunakan fasilitas laboratorium pengujian dan menyiapkan usul tindak turun tangan atas pelaksanaan pembangunan.

- Seksi Peralatan dan Inventarisasi Kekayaan Milik Negara

Tugasnya melakukan pembinaan dan pengelolaan peralatan serta melakukan inventarisasi barang kekayaan milik negara dan administrasi penghapusan.

3.2.4 Bagian Bidang Bina Jasa Konstruksi

3.2.4.1 Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan usaha jasa konstruksi.

Fungsinya adalah :

- Penata usahaan registrasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa dan konstruksi;
- Pelayanan administrasi dalam perumusan, pemantauan dan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi;
- Penyajian informasi jasa konstruksi.

3.2.4.2 Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

- Seksi Registrasi, Klasifikasi dan Kualifikasi

Tugasnya melakukan penata usahaan registrasi, klasifikasi, dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi.

- Seksi Kinerja

Tugasnya memberikan pelayanan administratif dalam perumusan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi.

- Seksi Informasi Jasa Konstruksi

Tugasnya mengolah data, menyajikan, menyebarluaskan informasi, memberikan penyuluhan dibidang jasa konstruksi.

3.3 Sejarah Analytical Hierarchy Process (AHP)

Dalam rangka penyusunan usulan program/proyek Dep. PU, maka koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program dikaitkan dengan asas Desentralisasi yang merupakan syarat untuk memenuhi setiap usulan yang diajukan oleh proyek-proyek pembangunan PSD-PU (Prasarana dan Sarana Dasar-Pekerjaan Umum), sehingga dapat mencapai sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan PSD-PU. Maka dari itu Dep. PU mengembangkan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dirancang khusus untuk menentukan prioritas pembangunan PSD-PU yang mana direncanakan untuk dilaksanakan disuatu daerah. Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Terbatas (RAKERTAS) tgl. 15 s.d 17 November 1993, dan upaya menjabarkan petunjuk serta arahan Bapak Menteri PU, dengan Kep. Men PU No.519/KPTS/1993 tgl 26-Nov-1993, telah dibentuk tim tindak lanjut Rakertas yang bertugas menyusun :

- a. Prosedur penyusunan program dan anggaran tahunan
- b. Prosedur sinkronisasi program
- c. Tugas dan fungsi Kanwil
- d. Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Pada akhir bulan Mei 1994, program AHP sebagai salah satu hasil kerja dari tim tersebut diterbitkan dan diperkenalkan melalui pelaksanaan training di 5 diklat wilayah Dep. PU dan pelatihan setempat/ On The Job Training (OJT), di 13 kawasan Kanwil Dep. PU , dimana salah satunya adalah Kanwil Dep. PU Propinsi Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari OJT tersebut Kepala Biro Perencanaan Sekjen Dep. PU dengan suratnya No. UM. 01. 01. sk-2/38, tgl 12 Mei 1995, memohon agar program AHP mulai diujicobakan untuk penyusunan prioritas program PSD-PU pada Tahun Anggaran 1996/1997 untuk proyek-proyek dilingkungan Kanwil Dep. PU Propinsi Jawa Barat pada tanggal 13 s.d 14 Juni 1995 mengadakan penyuluhan tentang perangkat AHP terhadap proyek-proyek APBN dan Bappeda Tk. I & II se-Jawa Barat, dilanjutkan dengan pelaksanaannya di 25 kabupaten/kotamadya se-Jawa Barat yang dibagi dalam 5 Wilayah Kerja , dimulai dari awal bulan Juli 1995 sampai dengan akhir Juli 1995. Hasil akhir dari proses pelaksanaan AHP Tahun Anggaran 1996/1997 tersebut adalah susunan prioritas Bagian Proyek tingkat Kabupaten/Kotamadya TK. II (belum sampai pada tingkat Propinsi/Kanwil). Tetapi kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan proses AHP pada saat itu adalah bahwa perangkat program AHP masih perlu disempurnakan.

Sebagai kelanjutan dari proses AHP ini Bapak Sekjen Dep. PU dengan suratnya No. PR. 02.05-SJ/362 tanggal 19 April 1996, perihal penggunaan alat sinkronisasi (AHP) untuk persiapan usulan program PSD-PU Tahun Anggaran 1997/1998, meminta agar Usulan Program Proyek untuk Tahun Anggaran 1997/1998 digunakan AHP dengan skala penuh.

Sehubungan dengan surat Bapak Sekjen tersebut diatas, Kanwil Dep. PU propinsi Jawa Barat menanggapi dengan melaksanakan secara penuh dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan administrasi untuk pelaksanaan AHP.

- b. Rapat koordinasi dengan Dinas PU A,B,C para Pinpro/Pinbagpro, Bappeda Tk.I dan II, serta instansi terkait.
- c. Survey pengumpulan potensi desa se-Jawa Barat.
- d. Pengumpulan Data Proyek/Bagpro se-Jawa Barat.
- e. Proses Komputer (inputing data sampai dengan print out data).
- f. Pengiriman hasil print out data ke Departemen Pekerjaan Umum.

Kesimpulan dari pelaksanaan AHP untuk T.A. 1997/1998 adalah bahwa perangkat program AHP sebagai alat untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan PSD-PU dengan mengacu kepada kepentingan serta dampak fungsional dari sektor-sektor lain seperti pertanian, perindustrian, kepariwisataan, dan ekonomi lainnya dipandang sebagai sesuatu yang berguna dalam rangka peningkatan teknologi tepat guna serta daya guna dan hasil guna PSD-PU. Sampai saat ini hasil akhir dari program AHP tersebut adalah :

- a. Hierarkhi program perpropinsi;
- b. Hierarkhi kegiatan perpropinsi;
- c. Hierarkhi proyek perpropinsi dan
- d. Hierarkhi tolok ukur perkabupaten sebagai ujung tombaknya.